

**EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH
(KOTAKU) DI KELURAHAN BERBAS TENGAH
KECAMATAN BONTANG SELATAN
KOTA BONTANG**

Verald Bernard Ricardo, Fajar Apriani

**eJournal Administrasi Publik
Volume 13, Nomor 2, 2025**

HALAMAN PERSETUJUAN PENERBITAN ARTIKEL EJOURNAL

Artikel eJournal dengan identitas sebagai berikut:

Judul : Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang.

Pengarang : Verald Bernard Ricardo

NIM : 2002016029

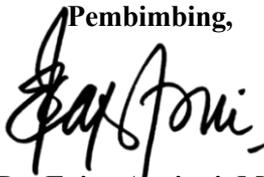
Program Studi : Administrasi Publik

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

telah diperiksa dan disetujui untuk dionlinekan di eJournal Program Studi Administrasi Publik Fisip Unmul.

Samarinda, 14 September 2025

Pembimbing,



Dr. Fajar Apriani, M.Si.
NIP 19830414 200501 2 003

Bagian di bawah ini

DIISI OLEH ADMIN EJOURNAL ADMINISTRASI PUBLIK

Identitas terbitan untuk artikel di atas

Nama Terbitan	: eJournal Administrasi Publik
----------------------	---------------------------------------

Volume	: 13
---------------	-------------

Nomor	: 2
--------------	------------

Tahun	: 2025
--------------	---------------

Halaman	: 635-644
----------------	------------------

EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH (KOTAKU) DI KELURAHAN BERBAS TENGAH KECAMATAN BONTANG SELATAN KOTA BONTANG

Verald Bernard Ricardo ¹, Fajar Apriani ²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan hasil evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada lima indikator evaluasi program menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan, serta faktor penghambat implementasi program. Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan key informan yaitu Kepala Seksi Pembangunan dan Ekonomi Kelurahan Berbas Tengah, serta informan lain seperti Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bontang, Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM), Ketua RT 24, dan masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh melalui dokumen resmi peraturan, laporan, dan arsip dari instansi terkait. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah belum berjalan optimal. Beberapa sasaran program tidak tepat, seperti distribusi bantuan tangka septic dan motor sampah yang belum merata dan kurang diterima oleh masyarakat. Selain itu, kegiatan monitoring dan partisipasi warga dalam program masih rendah. Faktor penghambat lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat akan pentingnya program serta lemahnya koordinasi antara pelaksana program dengan warga penerima manfaat.

Kata Kunci : *Evaluasi Program, Program Kota Tanpa Kumuh*

Pendahuluan

Permukiman kumuh menjadi salah satu tantangan utama pembangunan perkotaan di Indonesia. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, kawasan kumuh didefinisikan sebagai lingkungan yang tidak layak huni akibat ketidaksesuaian konstruksi bangunan, kepadatan tinggi, serta infrastruktur dasar yang minim. Untuk mengatasi persoalan ini, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya

¹ Mahasiswa Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: veraldricardol@gmail.com

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman.

Kementerian PUPR meluncurkan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) sebagai bagian dari Gerakan 100-0-100 (100% akses air minum, 0% kawasan kumuh, dan 100% akses sanitasi layak).

Program KOTAKU bertujuan meningkatkan kualitas permukiman kumuh melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dua sasaran utama program ini adalah memperluas akses masyarakat terhadap infrastruktur dasar, serta mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pencegahan dan peningkatan kualitas kawasan kumuh. Pelaksanaan program melibatkan lima tahap penting, yakni pendataan, perencanaan, pelaksanaan, keberlanjutan, dan evaluasi. Dalam konteks pelaksanaan, partisipasi masyarakat menjadi elemen kunci, karena keberhasilan program sangat bergantung pada keterlibatan aktif warga dalam perencanaan dan implementasi kebijakan.

Salah satu daerah yang menjadi sasaran program KOTAKU adalah Kelurahan Berbas Tengah, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang. Berdasarkan Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2018, wilayah ini ditetapkan sebagai kawasan kumuh dengan karakteristik seperti rendahnya akses sanitasi, maraknya praktik Buang Air Besar Sembarangan (BABS), serta buruknya sistem pengelolaan sampah. Untuk itu, pada tahun 2018–2019, Kelurahan Berbas Tengah menerima Bantuan Dana Investasi (BDI) senilai Rp6,35 miliar yang dialokasikan untuk enam RT prioritas.

Namun, dalam pelaksanaannya, ditemukan sejumlah kendala seperti rendahnya kesadaran masyarakat, penolakan terhadap bantuan infrastruktur, serta lemahnya monitoring dan evaluasi dari pihak pelaksana. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menghambat pencapaian tujuan program.

Kerangka Dasar Teori Kebijakan Publik

Kebijakan merupakan salah satu tindakan yang mengarah pada suatu tujuan yang ditetapkan oleh stakeholder, kelompok, atau pemerintah dalam suatu kawasan tertentu yang berkaitan dengan tantangan-tantangan tertentu untuk memperoleh keuntungan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu keputusan yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa dan menyatu dapat dikategorikan sebagai kebijakan publik. Adanya kegiatan, tujuan, serta pemberitahuan pemerintah terkait masalah yang muncul semuanya dapat dilihat sebagai bagian dari aktivitas kebijakan. Menurut Dye (2013:4), "*public policy is whatever governments choose to do or not to do,*" yang berarti kebijakan publik mencakup keputusan yang dibuat oleh pemerintah dalam merespons isu atau masalah yang ada di masyarakat, baik melalui tindakan maupun ketidaktindakan. Sementara itu, menurut Nugroho (2014:76–77), kebijakan publik dapat dipahami sebagai keputusan politik yang lahir dari interaksi berbagai aktor, nilai, norma, serta

kepentingan, sehingga kebijakan tidak hanya dipandang sebagai produk hukum, tetapi juga hasil dari proses politik yang kompleks

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi berasal dari kata *evaluation* yang secara etimologis berarti menilai atau menentukan nilai suatu objek. Dalam konteks kebijakan publik, evaluasi merujuk pada proses sistematis untuk menilai apakah suatu kebijakan telah mencapai tujuannya, sejauh mana pelaksanaannya efektif dan efisien, serta bagaimana dampaknya terhadap masyarakat. Bryant dan White (dalam Musthofa, 2011) menjelaskan bahwa evaluasi adalah proses dokumentasi dan penilaian terhadap pelaksanaan suatu kebijakan atau program. Evaluasi tidak hanya mencatat apa yang telah terjadi, tetapi juga menilai apakah proses tersebut sesuai dengan rencana serta memberikan hasil yang diharapkan.

Dunn (2003:415) mendefinisikan evaluasi kebijakan sebagai aktivitas yang dirancang untuk menilai hasil-hasil dari suatu kebijakan dengan membandingkan hasil tersebut dengan tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Sementara itu, Dye (2013) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses sistematis untuk menentukan efektivitas kebijakan publik, termasuk dampaknya terhadap masyarakat.

Musthofa (2011) menyebutkan bahwa evaluasi kebijakan dapat diklasifikasikan berdasarkan tahap pelaksanaannya:

1. *Ex-Ante Evaluation* (Pra Pelaksanaan): Dilakukan sebelum program dimulai untuk menilai kelayakan dan alternatif yang tersedia.
2. *On-Going Evaluation* (Saat Pelaksanaan): Dilakukan saat program sedang berjalan untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan rencana awal.
3. *Ex-Post Evaluation* (Pasca Pelaksanaan): Dilakukan setelah program selesai, untuk menilai dampak, efektivitas, dan keberlanjutan program dalam jangka panjang.

Evaluasi dalam penelitian ini termasuk dalam kategori *ex-post*, karena dilakukan setelah program KOTAKU selesai dilaksanakan.

Dunn (2003:156) mengajukan enam kriteria utama dalam mengevaluasi kebijakan publik, lima di antaranya digunakan dalam penelitian ini:

1. Efektivitas: Mengukur sejauh mana tujuan program telah tercapai. Semakin tinggi pencapaian, semakin efektif kebijakan tersebut.
2. Efisiensi: Menilai rasio antara hasil (*output*) yang diperoleh dan sumber daya (*input*) yang digunakan. Kebijakan dianggap efisien jika menghasilkan manfaat besar dengan biaya seminimal mungkin.
3. Kecukupan: Menggambarkan sejauh mana hasil program mampu mengatasi masalah yang dituju. Kecukupan juga menilai apakah intervensi sudah cukup menjawab kebutuhan publik.
4. Responsivitas: Menunjukkan seberapa besar kebijakan menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Jika masyarakat merasa terbantu dan didengar, maka

program dianggap responsif.

5. Ketepatan: Mengukur kesesuaian program terhadap kelompok sasaran dan kondisi lokal. Ketepatan sangat penting untuk memastikan program tidak meleset dari tujuan awal.

Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)

Program Kota Tanpa Kumuh merupakan upaya strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Umum yang bertujuan untuk mempercepat menangani pemukiman kumuh di Indonesia dan mendukung Gerakan 100-0-100. Membangun sistem, memberikan dukungan kepada pemerintah daerah, dan memberikan dukungan kepada komunitas adalah fokus kebijakan pembangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya

Tujuan Program KOTAKU adalah untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutamanya masyarakat yang berada di pemukiman kumuh, melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan di pemukiman kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak di huni, produktif, dan berkelanjutan. (Kementerian PUPR, 2015:6)

Program KOTAKU dilaksanakan dengan pendekatan kolaboratif melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan pemberdayaan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan penanganan kawasan kumuh. (Bappenas,2016:12)

Menurut Irvan (2018), partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU sangat penting, tidak hanya sebagai bentuk pelaksanaan demokrasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa hasil pembangunan tepat sasaran dan berkelanjutan. Keterlibatan warga diwujudkan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan program secara langsung

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang. Penelitian ini melihat pada evaluasi Program dilakukan dengan menggunakan lima dimensi utama, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan dalam pelaksanaan program. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji faktor-faktor penghambat yang muncul dalam pelaksanaan Program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana program tersebut berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Data primer dan sekunder adalah dua jenis sumber yang digunakan dalam penelitian ini. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dengan informan-informan penting, termasuk Kepala Seksi Pembangunan dan Ekonomi Kelurahan Berbas Tengah. Data tambahan diperoleh dari Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kota Bontang, Lembaga Swadaya Masyarakat di Kelurahan Berbas Tengah, Ketua RT 24

Kelurahan Berbas Tengah, Masyarakat di Kelurahan Berbas Tengah. Informan kunci dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling.

Analisis model interaktif oleh Miles, Huberman dan Saldana (2014) adalah pendekatan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini. Pendekatan ini terdiri dari empat tahap: pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penulisan kesimpulan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang

Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) salah satu program yang diarahkan untuk menangani permasalahan permukiman kumuh, melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman perkotaan. Program ini memiliki target penanganan seluas 23.656 hektar dari 38.431 hektar yang menjadidi target nasional, peningkatan kualitas infrastruktur permukiman di lakukan melalui pendekatan skala lingkungan dan skala kawasan yang dilakukan pada 94 Kota prioritas, salah satunya di Kota Bontang. Proses perencanaan program kotaku di kota Bontang untuk Kelurahan Berbas Tengah ini dilakukan di beberapa RT yaitu RT 23, RT 24, RT 25, RT 34, RT 35, RT 53. Selama proses perencanaan ini Pemerintah mengajak masyarakat untuk ikut serta turun membantu dalam mewujudkan keberhasilan program ini. Evaluasi dalam Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) mempunyai peranan dalam menentukan keberhasilan suatu program yang dilaksanakan dalam penelitian ini, peneliti berfokus dalam pelaksanaan program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah Kota Bontang. Dalam hal ini peneliti mengetahui bahwa evaluasi program tersebut peneliti menggunakan teori Dunn (2003) sebagai indikator dalam menyelesaikan permasalahan. Adapun indikator yang digunakan yaitu Efektivitas, Efisiensi, Kecukupan, Responsivitas, Ketepatan.

a. Efektivitas

Efektivitas program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah terlihat dari sejumlah capaian, terutama dalam aspek perbaikan infrastruktur dan peningkatan kualitas hunian. Perbaikan drainase dan jalan terbukti mampu mengurangi genangan serta meningkatkan kenyamanan masyarakat, meskipun cakupannya masih terbatas pada area tertentu. Selain itu, sebanyak 24 rumah tidak layak huni telah diperbaiki melalui komunikasi intensif antara pemerintah dan warga, yang berdampak pada terciptanya hunian lebih sehat dan layak, meskipun resistensi awal tetap memerlukan sosialisasi lanjutan. Namun, efektivitas program masih menghadapi tantangan pada aspek pengelolaan sampah, proteksi kebakaran, dan perilaku sanitasi. Penggunaan sarana motor sampah belum optimal karena partisipasi masyarakat dalam iuran operasional rendah, sementara akses jalan sempit menghambat penanganan kebakaran sehingga perlu edukasi tentang

penggunaan APAR dan pengaturan parkir. Masalah buang air besar sembarangan (BABS) juga masih ditemukan, khususnya di kawasan pesisir, meski telah tersedia tangki septik bantuan pemerintah dan CSR PT BADAQ NGL. Hal ini menunjukkan bahwa Efektivitas Program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah terlihat dari perbaikan infrastruktur dasar dan rehabilitasi rumah tidak layak huni, meskipun masih terkendala pada pengelolaan sampah dan perilaku sanitasi masyarakat. Menurut Nugroho (2014: 77), efektivitas kebijakan publik diukur dari sejauh mana kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Dalam kasus ini, capaian fisik program sudah sesuai target, tetapi keberhasilan dalam aspek sosial masih terbatas karena rendahnya kesadaran masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan temuan Ramadhani (2019) yang menekankan bahwa meskipun program penataan lingkungan kumuh relatif efektif, partisipasi masyarakat dan kesadaran perilaku sanitasi menjadi faktor pembatas. Liandri & Suheri (2020) juga menemukan efektivitas KOTAKU di daerah lain belum optimal karena tidak semua infrastruktur berjalan sesuai perencanaan. Dengan demikian, efektivitas lebih terlihat pada pencapaian fisik, tetapi masih rendah pada perubahan perilaku masyarakat.

b. Efisiensi

Efisiensi program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah dapat dilihat dari bagaimana sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan perbaikan permukiman. Upaya perbaikan rumah yang sebelumnya tidak layak huni berhasil dilakukan melalui keterlibatan masyarakat, yang menunjukkan bahwa partisipasi warga menjadi faktor kunci keberhasilan meskipun masih ditemui kendala dalam prosesnya. Perbaikan drainase dan jalan cor juga memberikan manfaat nyata berupa berkurangnya genangan dan meningkatnya aksesibilitas, meskipun kapasitas drainase yang terbatas masih menimbulkan banjir saat hujan lebat.

Di sisi lain, terdapat indikasi ketidakefisienan dalam pemanfaatan beberapa fasilitas, seperti bantuan motor sampah yang kurang diterima masyarakat akibat biaya operasional, serta ketidakseimbangan distribusi sarana proteksi kebakaran antar-RT. Kondisi ini menunjukkan bahwa, adanya ketidakefisienan pada motor sampah dan distribusi sarana proteksi kebakaran menunjukkan adanya kelemahan dalam desain program. Hal ini konsisten dengan Irma (2019) yang menemukan adanya gap antara input–proses–produk dalam program KOTAKU, di mana keterbatasan sumber daya serta kurangnya dukungan masyarakat mengurangi efisiensi. Liandri & Suheri (2020) juga menyebutkan adanya jurang antara perencanaan dan realisasi, yang menyebabkan pemborosan sumber daya.

c. Kecukupan

Evaluasi kecukupan program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah menunjukkan adanya dampak positif terhadap penataan kawasan permukiman. Perbaikan rumah di sejumlah RT yang dipilih berhasil meningkatkan kualitas hunian dan menciptakan lingkungan yang lebih tertata dengan melibatkan masyarakat serta fasilitator. Perbaikan jalan dan drainase juga dirasakan

manfaatnya secara langsung, karena mampu mengurangi genangan air saat hujan dan mendukung aktivitas masyarakat dengan infrastruktur yang lebih layak.

Selain itu, penyediaan motor sampah sebagai sarana pengelolaan lingkungan memperlihatkan hasil yang beragam. Sebagian masyarakat mendukung dengan bersedia membayar iuran, namun sebagian lain menolak karena terkendala biaya operasional dan perawatan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara umum program KOTAKU sudah cukup memberikan manfaat, namun tingkat kecukupan masih dipengaruhi oleh faktor sosial ekonomi warga, misalnya penolakan terhadap iuran motor sampah. Bryant dan White (dalam Musthofa, 2011) menyebutkan bahwa kebijakan publik dinilai memadai jika dapat mengatasi masalah utama masyarakat dengan memberikan solusi nyata. Walaupun infrastruktur telah terbangun, penolakan sebagian masyarakat terhadap iuran menunjukkan bahwa keberhasilan program belum sepenuhnya memadai. Hal ini serupa dengan penelitian Ramadhani (2019) yang menunjukkan bahwa manfaat program belum merata karena adanya penolakan sebagian masyarakat terhadap intervensi lingkungan tertentu. Irma (2019) juga menegaskan bahwa tanpa forum sosialisasi yang kuat, manfaat program cenderung hanya dirasakan sebagian warga. Dengan kata lain, kecukupan capaian program bersifat parsial dan tidak merata.

d. Responsivitas

Responsivitas program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah umumnya dinilai positif oleh masyarakat, terutama terkait pembangunan jalan lingkungan dan drainase yang dianggap relevan dengan kebutuhan mereka. Pelibatan masyarakat dalam pengerjaan infrastruktur serta pembentukan LKM/KSM memperlihatkan bahwa program ini tidak hanya memberi manfaat fisik, tetapi juga mendorong partisipasi warga. Namun, tantangan masih muncul pada aspek kesadaran masyarakat dalam merawat hasil pembangunan, misalnya menjaga kebersihan drainase agar tetap berfungsi optimal.

Di sisi lain, beberapa bantuan seperti motor sampah, motor pemadam, dan tangki septik mendapat tanggapan beragam. Sebagian warga merasa terbantu, sementara yang lain menilai realisasinya kurang tepat, terutama karena biaya operasional yang dianggap membebani dan adanya ketidaktepatan dalam pendataan penerima jamban. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program KOTAKU cukup responsif terhadap kebutuhan dasar masyarakat, namun masih ada keluhan tentang biaya operasional dan pendataan penerima bantuan. Dye (2013: 4) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah pilih untuk dilakukan atau tidak dilakukan, sehingga responsivitas dapat dilihat dari sejauh mana pemerintah merespon kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, program sudah relevan dengan aspirasi warga, tetapi lemahnya koordinasi membuat distribusi manfaat belum merata. Hal ini selaras dengan Ramadhani (2019) yang menyoroti perbedaan respon masyarakat terhadap program, di mana keberhasilan bergantung

pada partisipasi aktif. Irma (2019) juga menekankan pentingnya komunikasi intensif agar respons masyarakat lebih positif.

e. Ketepatan

Ketepatan program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah terlihat dari keberhasilannya dalam menangani kawasan kumuh dan mengubahnya menjadi lingkungan yang lebih layak huni. Program ini dinilai telah berjalan sesuai tujuan utama, yaitu meningkatkan kualitas permukiman melalui perbaikan infrastruktur dasar, penataan hunian, serta penyediaan fasilitas pendukung. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa pelaksanaan program dinilai tepat sasaran karena berhasil menurunkan tingkat kekumuhan dan meningkatkan kualitas permukiman sesuai tujuan utama. Nugroho (2014: 80) menjelaskan bahwa ketepatan kebijakan dilihat dari kesesuaian antara perumusan tujuan dengan implementasi di lapangan. Dalam kasus ini, tujuan program berhasil diwujudkan melalui perbaikan infrastruktur dan hunian yang lebih sehat. Hal ini sejalan dengan Liandri & Suheri (2020) yang menemukan bahwa sasaran program kadang tidak tepat, sehingga capaian output kurang selaras dengan kondisi sosial-ekonomi warga.

Faktor Penghambat Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang

Evaluasi Program KOTAKU di Kelurahan Berbas Tengah masih menghadapi sejumlah hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Salah satu kendala utama adalah belum optimalnya upaya pengurangan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) meskipun telah disediakan bantuan tangki septik melalui kerja sama dengan CSR PT BADAQ NGL. Resistensi sebagian masyarakat untuk memanfaatkan fasilitas tersebut, baik karena keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya sanitasi maupun kebiasaan membuang limbah langsung ke laut, menghambat tercapainya tujuan program. Kondisi ini menunjukkan perlunya sosialisasi yang lebih intensif mengenai dampak buruk BABS serta manfaat jangka panjang dari penggunaan fasilitas sanitasi.

Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mendukung program masih rendah karena dipengaruhi oleh sikap pamrih. Beberapa warga menganggap kontribusi dalam bentuk iuran, seperti untuk operasional motor sampah, sebagai beban tambahan sehingga enggan berpartisipasi. Rendahnya kesadaran dan rasa memiliki program berdampak pada kurang optimalnya pemanfaatan sarana yang telah disediakan. Hal ini menegaskan perlunya strategi yang lebih partisipatif, dengan melibatkan masyarakat sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, serta penerapan insentif atau penghargaan bagi warga yang aktif berkontribusi agar keterlibatan mereka dapat ditingkatkan.

Hambatan lain terletak pada aspek monitoring dan tanggapan dari pihak pelaksana program. Minimnya pemantauan langsung menyebabkan berbagai keluhan masyarakat tidak ditindaklanjuti dengan baik, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpuasan dan penurunan kepercayaan terhadap program.

Lemahnya monitoring juga membuat masalah di lapangan sulit terdeteksi sejak dini, seperti ketidaksesuaian pelaksanaan dengan kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan frekuensi monitoring, pembangunan forum warga, serta penyediaan saluran pengaduan yang responsif menjadi langkah penting untuk memperbaiki sistem evaluasi dan memastikan program berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan belum sepenuhnya berjalan optimal. Beberapa indikator evaluasi menunjukkan keberhasilan, seperti perbaikan jalan, drainase, dan peningkatan kualitas hunian, yang telah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Namun, masih terdapat aspek yang belum tepat sasaran, antara lain penyediaan tangki septik untuk pengurangan BABS yang belum diterima secara merata maupun sepenuhnya dimanfaatkan oleh masyarakat, serta bantuan motor sampah dan motor pemadam yang sebagian ditolak karena alasan biaya operasional dan perawatan. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan program masih rendah, dan mekanisme monitoring dari pihak pelaksana juga belum maksimal karena kurangnya pengawasan langsung di lapangan.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan program meliputi terbatasnya partisipasi masyarakat, resistensi terhadap beberapa bentuk bantuan, serta lemahnya monitoring dan evaluasi oleh pihak pelaksana. Kondisi ini berdampak pada belum optimalnya pencapaian tujuan program dalam menciptakan kawasan permukiman yang benar-benar bebas dari kekumuhan. Dengan demikian, diperlukan upaya peningkatan kesadaran dan keterlibatan masyarakat, pemerataan distribusi bantuan, serta penguatan monitoring dan evaluasi agar program KOTAKU dapat berjalan lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan terdapat beberapa rekomendasi untuk peningkatan pelaksanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Berbas Tengah Kecamatan Bontang Selatan. Pertama, pelaksana program di tingkat kabupaten maupun kota perlu lebih menyesuaikan bentuk bantuan dengan kebutuhan masyarakat agar program dapat tepat sasaran dan benar-benar bermanfaat. Selain itu, penting untuk memperkuat sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai tujuan utama program, yakni mendorong keterlibatan aktif warga. Dengan demikian, partisipasi masyarakat dapat meningkat dan mendukung keberlanjutan hasil program.

Selanjutnya, diperlukan kesadaran kolektif masyarakat untuk tidak membuang sampah maupun melakukan BABS (buang air besar sembarangan) ke laut, sehingga kualitas lingkungan tetap terjaga dan manfaat program dapat dirasakan secara jangka panjang. Monitoring dan evaluasi juga perlu diperkuat melalui keterlibatan langsung pihak pelaksana di lapangan. Langkah ini penting agar setiap kendala dan kekurangan dapat segera diidentifikasi serta diperbaiki, sehingga tujuan program KOTAKU tercapai secara lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Dunn, William N. 2003. *Public Policy Analysis: An Introduction*. New Jersey: Pearson Prentice Hall.
- Dye, Thomas R. 2013. *Understanding Public Policy*. Boston: Pearson.
- Irma. 2019. *Evaluasi Tata Kelola Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kota Makassar (Studi Kasus Kelurahan Parang Tambung)*. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar.
https://digilibadmin.unismuh.ac.id/upload/7989-Full_Text.pdf
- Keputusan Wali Kota Bontang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Penetapan Kawasan Kumuh di Kota Bontang.
- Liandri, B., & Suheri, T. 2020. Evaluasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Lebakgede Kecamatan Coblong Kota Bandung. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 5(2), 123–135.
<https://ojs.unikom.ac.id/index.php/wilayahkota/article/view/3192>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. 2014. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru* (Edisi 3). Jakarta: UI Press.
- Musthofa, I. 2011. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nugroho, Riant. 2014. *Public Policy*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pedoman Umum Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU).
Petunjuk Teknis Program Kota Tanpa Kumuh.
- Ramadhani, Arwiny. 2019. Partisipasi Masyarakat dalam Program Penataan Lingkungan Kumuh di Kota Samarinda. *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, 15(1), 45–56.
[https://repository.unhas.ac.id/938/2/P022182006_tesis_23-10-2020\(FILEminimizer\)_1-2.pdf](https://repository.unhas.ac.id/938/2/P022182006_tesis_23-10-2020(FILEminimizer)_1-2.pdf)
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.